



Katalog BPS: 9207.53

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN 2005 - 2007



Kerjasama
Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur dan
Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

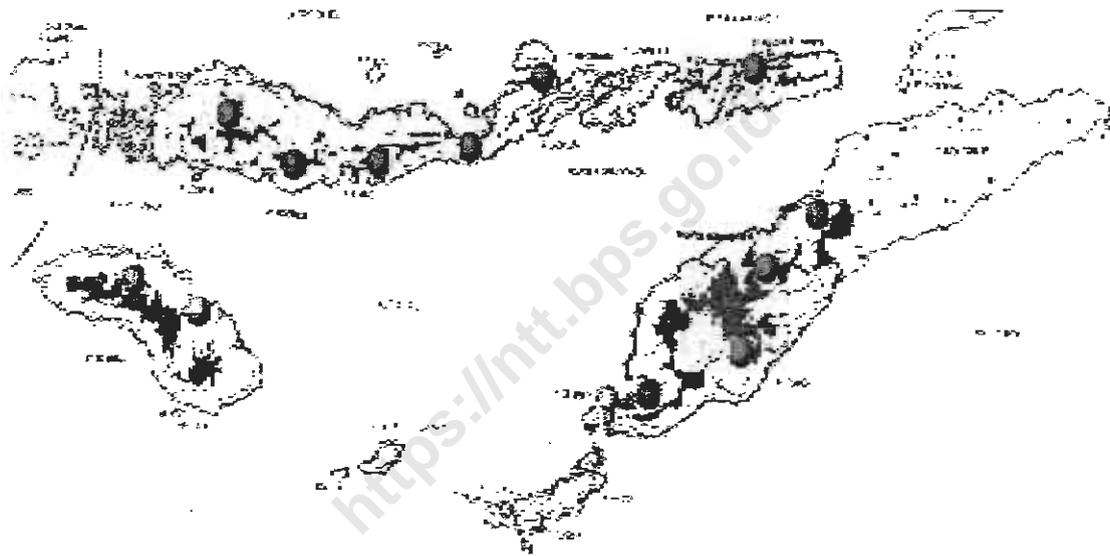


BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Katalog BPS: 9207.53

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN 2005 - 2007



*KERJASAMA
BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN BAPPEDA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR*



**Badan Pusat Statistik
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
2005 – 2007**

<https://ntt.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN 2005 – 2007

ISSN : 0854 – 9303
Nomor Publikasi : 53552.0001
Katalog BPS : 9207.53
Ukuran Buku : 21 cm × 28 cm
Jumlah Halaman : vii + 49

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

*Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111*

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2005-2007 merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur.

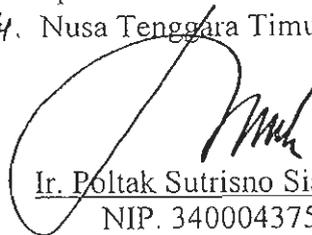
Selain menyajikan berbagai tabel dasar dan turunan tentang data Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur yang dirinci menurut komponen penggunaan, dalam publikasi ini disajikan pula analisis deskriptif tentang perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Timur dari sisi penggunaan pada kurun 2005-2007. Untuk lebih memperjelas berbagai terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi dan metodologi penghitungan yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini.

Data tahun 2007 yang disajikan masih bersifat sangat sementara. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat sampai dengan batas waktu penerbitan, beberapa data masih belum terkumpul secara lengkap. Penyempurnaan dan revisi terhadap data tersebut akan dilakukan pada penerbitan berikutnya.

Semua kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi di masa datang sangat diharapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini diucapkan banyak terima kasih.

Kupang, Oktober 2008

Kepala Badan Pusat Statistik
Nusa Tenggara Timur,



Ir. Poltak Sutrisno Siahaan
NIP. 340004375

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Tabel-Tabel Lampiran	vii
I. Pendahuluan	2
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan	3
1.3 Konsep dan Definisi	5
1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data	9
II. Tinjauan PDRB Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan	15
2.1 Komposisi Penggunaan PDRB	15
2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB	20
III. Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan	23
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	23
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	25
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	29
3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto	32
Tabel-Tabel Lampiran	36-49
Daftar Pustaka	50

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1a. Komposisi Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku	16
2.1b. Komposisi Penggunaan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku	18
2.2 Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT Atas Dasar Harga Konstan 2000	21
3.1 Proporsi Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Pengeluaran, Nusa Tenggara Timur	23
3.2 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kelompok Pengeluaran, Nusa Tenggara Timur	24
3.3 Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga, Nusa Tenggara Timur	25
3.4 Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenis Lembaga, Nusa Tenggara Timur....	26
3.5 Proporsi Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran	27
3.6 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenisnya, Nusa Tenggara Timur	29
3.7 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang, Nusa Tenggara Timur	30
3.8 Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Asal Barang, Nusa Tenggara Timur	31
3.9 Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Berlaku, Nusa Tenggara Timur	32
3.10 Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Berlaku, Nusa Tenggara Timur	33
3.11 Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Konstan 2000, Nusa Tenggara Timur	34

DAFTAR TABEL-TABEL LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2005-2007	36
2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2005-2007	37
3. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2005-2007	38
4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Menurut Penggunaan, Tahun 2005-2007	39
5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2005-2007	40
6. Konsumsi Rumah tangga Nusa Tenggara Timur, Tahun 2005-2007	41
7. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Nusa Tenggara Timur, Tahun 2005-2007	42
8. Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Tahun 2005-2007	43
9. Pembentukan Modal Tetap Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2005-2007 ...	44
10. Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2005-2007	45
11. Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005-2007	46
12. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005-2007	47
13. Indeks Perkembangan Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005-2007	48
14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005-2007	49

I. PENDAHULUAN

- ✓ ***Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)***
 - ✓ ***PDRB Menurut Komponen Penggunaan***
 - ✓ ***Konsep dan Definisi***
 - ✓ ***Metode Penghitungan dan Sumber Data***

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang umum digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya perekonomian suatu wilayah. Jika PDRB suatu wilayah semakin besar maka semakin besar pula sumber daya ekonomi di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Untuk menghitung PDRB dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pengertian PDRB pada masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pada pendekatan produksi**, PDRB didefinisikan sebagai jumlah dari semua nilai yang berhasil ditambahkan terhadap barang dan jasa melalui kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah (*region*) dalam periode waktu tertentu.
- b. **Pada pendekatan pendapatan**, PDRB adalah jumlah dari seluruh balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.
- c. **Pada pendekatan pengeluaran**, PDRB merupakan jumlah dari pengeluaran konsumen akhir atas barang dan jasa akhir di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Barang dan jasa akhir yang dimaksudkan dalam hal ini adalah barang dan jasa yang tidak digunakan sebagai input dalam suatu kegiatan produksi. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor (sebagai pengurang).

Hasil penghitungan PDRB berdasarkan ketiga pendekatan tersebut secara teori tidak akan berbeda satu sama lain. Namun demikian dalam prakteknya sering terdapat selisih atau diskrepansi statistik yang merupakan akibat dari kekurangakuratan data.

PDRB suatu wilayah pada umumnya dihitung dengan menggunakan dua sistem penilaian, yaitu:

- a. Penilaian **atas dasar harga berlaku**. Dalam sistem penilaian ini maka seluruh barang dan jasa yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PDRB dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada periode penghitungan.
- b. Penilaian **atas dasar harga konstan**. Dalam sistem ini maka barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu yang dijadikan sebagai periode dasar. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dalam publikasi ini dilakukan dengan menggunakan harga tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Hasil penghitungan PDRB dengan dua sistem penilaian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat ukuran atau skala perekonomian suatu wilayah, dan juga menjadi dasar untuk mengamati struktur perekonomian suatu wilayah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan lebih banyak digunakan untuk mengamati perkembangan tingkat produksi dari seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan juga merupakan data dasar yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan

Produk dari suatu kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan pemanfaatannya, yaitu **produk antara** dan **produk akhir**. Produk antara adalah produk dari suatu unit ekonomi yang digunakan sebagai input dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh unit ekonomi lain. Sedangkan produk akhir adalah produk yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi dan langsung digunakan atau dikonsumsi sebagaimana adanya, tanpa melalui kegiatan produksi lebih lanjut.

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, jumlah dari semua produk (barang dan jasa) akhir yang dikonsumsi oleh seluruh konsumen akhir (bukan untuk kepentingan produksi) di suatu wilayah akan sama dengan PDRB wilayah tersebut. PDRB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan inilah yang dikenal sebagai PDRB menurut komponen penggunaan.

Produk akhir dari suatu kegiatan ekonomi pada dasarnya memiliki dua kegunaan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan untuk investasi. Produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mencakup semua produk yang habis digunakan atau dikonsumsi selama periode penghitungan, dan tidak digunakan untuk menghasilkan produk lain. Dengan demikian, produk yang dikonsumsi secara ekonomi telah 'keluar' dari aktivitas produksi. Sementara produk

yang digunakan untuk investasi mencakup semua barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam periode penghitungan dan secara otomatis akan menambah akumulasi 'kesejahteraan' wilayah.

Dengan menggunakan simbol Y untuk PDRB, C untuk konsumsi dan I untuk investasi, maka dapat dituliskan hubungan identitas:

$$Y = C + I$$

Dalam hubungan ini tersirat bahwa pendefinisian C dan I harus dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah telah benar-benar habis digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk kepentingan investasi.

Penggolongan permintaan terhadap produk akhir (disebut sebagai permintaan akhir) menjadi konsumsi dan investasi memang terasa sangat sederhana dan agregatif. Pada kenyataannya, baik konsumsi maupun investasi terdiri dari berbagai jenis pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi secara umum dapat dibedakan menjadi konsumsi perorangan dan konsumsi publik. Konsumsi perorangan mencakup konsumsi yang dilakukan rumah tangga dan lembaga nirlaba (tidak mencari untung). Ciri dari konsumsi perorangan adalah (i) mencakup pengeluaran perorangan dalam kapasitas sebagai pribadi dan (ii) pengeluaran tersebut harus berupa barang dan jasa yang habis digunakan maksimal dalam satu tahun. Pengeluaran dari lembaga nirlaba dicakup sebagai komponen konsumsi karena pada kenyataannya lembaga atau institusi jenis ini memang tidak melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Sementara itu konsumsi publik mencakup pengeluaran konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi yang dicatat dalam hal ini hanyalah pengeluaran atas barang dan jasa yang habis digunakan pada tahun berjalan, sedangkan pengeluaran untuk membangun jalan dan sejenisnya dicakup dalam investasi.

Secara sederhana, pengeluaran untuk investasi akan mencakup semua jenis pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Pengeluaran investasi pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan level perekonomian, semisal peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan atau kepuasan di masa yang akan datang. Pengeluaran investasi pada dasarnya dapat dibedakan atas investasi domestik dan investasi luar wilayah. Investasi domestik terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan

stok. Sedangkan investasi luar wilayah berupa ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan impor dan antar pulau masuk.

Dengan demikian hubungan identitas dalam perekonomian dapat digambarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

$$Y = C_h + C_g + I_f + I_s + (X - M)$$

di mana Y = PDRB, C_h = konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, C_g = konsumsi pemerintah, I_f = pembentukan modal tetap domestik bruto, I_s = perubahan stok, X = ekspor dan antar pulau keluar, dan M = impor dan antar pulau masuk.

Masing-masing peubah pada sisi sebelah kanan dari persamaan identitas tersebut pada hakekatnya merupakan komponen penggunaan dari PDRB suatu wilayah. Atau dengan kata lain jelas bahwa PDRB suatu wilayah dapat dirinci menurut penggunaannya, yaitu untuk konsumsi (rumahtangga, lembaga nirlaba, pemerintah) dan investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor dan antar pulau keluar, dikurangi impor dan antar pulau masuk).

Penyusunan PDRB menurut komponen penggunaan memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk melakukan analisis pola permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas ekonomi. Melalui analisis ini dapat diketahui masing-masing proporsi PDRB yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Jika proporsi konsumsi terlalu besar dapat diduga bahwa peningkatan kapasitas perekonomian di wilayah yang bersangkutan akan relatif berat, karena sumber daya yang digunakan untuk investasi akan mengecil. Dari analisis ini juga dapat diketahui seberapa besar 'kebocoran' yang harus diderita sebagai akibat dari besarnya barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar wilayah untuk memenuhi permintaan yang ada. Bagi perencana pembangunan di bidang ekonomi informasi ini tentu saja dapat memperkaya masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil.

1.3 Konsep dan Definisi

Sesuai dengan uraian pada bagian terdahulu maka PDRB menurut penggunaan dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Dalam publikasi ini permintaan akhir dikelompokkan menjadi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor dan antar pulau

keluar. Mengingat untuk memenuhi permintaan tersebut ada sebagian barang yang harus didatangkan dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur, maka jumlah dari seluruh komponen tersebut harus dikurangi dengan nilai impor barang dan antar pulau masuk.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung setiap komponen penggunaan tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa untuk tujuan konsumsi dan habis digunakan dalam periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto barang-barang bekas dan sisa. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa. Pembelian barang-barang yang tidak dapat direproduksi seperti hasil karya seni, barang-barang antik dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Selain itu pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup juga pembelian barang-barang modal yang dapat diraba seperti mobil, motor, *furniture*, radio dan lain-lain yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi. Namun demikian pembelian rumah tidak dicakup. Pengeluaran untuk sewa rumah dan perbaikannya, pengeluaran untuk rekening listrik, air, telepon dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Begitu juga pengeluaran untuk pemakaian jasa dari pihak lain (jasa kesehatan, pendidikan, rekreasi/hiburan dan jasa lainnya) dicakup dalam pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dihitung berdasarkan konsep pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk (residen), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang menetap di suatu wilayah domestik ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar wilayah, dikurangi dengan pengeluaran bukan penduduk yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi pembelian dan penerimaan transfer dalam bentuk barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang dibayar oleh lembaga yang bersangkutan, dikurangi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lembaga swasta nirlaba adalah lembaga/badan swasta yang dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Contoh lembaga swasta nirlaba adalah organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi pelatih, badan-badan

keagamaan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang khusus melayani masyarakat dan tidak menciptakan keuntungan untuk lembaga.

Unit usaha dari lembaga swasta ini bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Lembaga swasta nirlaba yang keuangan dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah, merupakan bagian dari pengeluaran kegiatan pemerintah dan tidak dicakup dalam pengeluaran lembaga swasta nirlaba.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup semua jenis pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan sipil dan pertahanan. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksudkan terdiri dari departemen, lembaga non departemen dan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintah desa. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah seperti Perum, Perjan, Perseroan, PN dan sebagainya tidak dicakup di sini, karena kegiatan dari masing-masing badan usaha tersebut merupakan kegiatan produksi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah antara lain terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang. Termasuk di dalamnya belanja perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin. Penerimaan dari hasil kegiatan produksi barang dan jasa tidak dicakup ke dalam pengeluaran konsumsi pemerintah.

d. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam wilayah dan pembelian barang modal baru dan bekas dari luar wilayah. Barang modal yang dimaksudkan adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pada umumnya memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat berupa pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi atau dalam bentuk mesin dan alat perlengkapan lainnya. Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah dan cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan

merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang afkiran dari dalam daerah juga tidak termasuk dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada waktu pertama kali dibeli. Pembelian atau pembuatan barang-barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, alat-alat persenjataan, bangunan konstruksi dan barang-barang pertahanan lainnya tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang konstruksi yang digunakan militer tersebut bersifat konsumtif dan diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah.

e. Perubahan Stok

Perubahan stok merupakan selisih antara stok pada akhir tahun dengan stok pada awal tahun. Stok yang dimaksudkan adalah barang jadi yang belum sempat digunakan, barang setengah jadi dan barang-barang masih dalam proses penyelesaian, baik yang merupakan barang konsumsi maupun barang modal. Stok barang konsumsi dapat disimpan oleh rumahtangga, pedagang (di toko) atau oleh perusahaan. Begitu juga stok modal dapat disimpan oleh rumahtangga atau pelaku ekonomi lain.

Bangunan yang belum selesai tidak termasuk dalam stok tetapi dimasukkan ke dalam komponen pembentukan modal tetap. Stok barang pada pemerintah adalah barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan pada waktu kritis. Tanaman hutan dan tanaman keras yang belum diambil hasilnya tidak termasuk dalam stok, akan tetapi pemeliharaan ternak untuk dipotong dikategorikan sebagai stok.

f. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan ekspor dan impor dapat berupa ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata dan jasa lainnya. Pembelian langsung oleh penduduk negara lain yang dilakukan di suatu negara dicatat sebagai ekspor dari negara tempat terjadinya transaksi. Sedangkan pembelian langsung oleh penduduk suatu negara yang dilakukan di luar negeri diperlakukan sebagai impor oleh negara yang bersangkutan.

g. Antar Pulau Keluar dan Masuk

Konsep antar pulau keluar dan antar pulau masuk sama dengan konsep untuk ekspor dan impor, hanya saja lingkup transaksinya terbatas pada antar daerah di suatu negara.

1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan setiap komponen penggunaan dalam PDRB Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Secara singkat metode penghitungan dan sumber datanya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Konsumsi Rumah tangga

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sayangnya SUSENAS tidak diselenggarakan setiap tahun. Sehingga untuk tahun-tahun yang data SUSENAS-nya tidak tersedia, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga terpaksa diestimasi menggunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Nusa Tenggara Timur idealnya harus mencakup pula konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur di luar wilayah dikurangi dengan konsumsi penduduk asing (luar Nusa Tenggara Timur) yang dilakukan di wilayah ini. Namun demikian karena keterbatasan data, komponen ini belum dapat ditaksir. Sehingga dalam hal ini terpaksa digunakan asumsi bahwa konsumsi penduduk Nusa Tenggara Timur sama dengan konsumsi penduduk luar Nusa Tenggara Timur yang dilakukan di wilayah ini.

b. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran lembaga swasta nirlaba adalah hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Namun demikian karena jumlah sampel dalam SKLNP relatif kecil, maka diperlukan penyesuaian berdasarkan hasil pengumpulan data lain seperti SKPR dan sejenisnya.

Penghitungan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba dilakukan dengan menjumlahkan perkiraan biaya antara dari setiap lembaga nirlaba yang ada di Nusa Tenggara Timur.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan baik dari APBN maupun APBD. Jadi dalam hal ini mencakup realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah tingkat I, II dan pemerintahan desa.

Selanjutnya nilai pengeluaran konsumsi pemerintah Nusa Tenggara Timur diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pengeluaran rutin yang lain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Hankam. Juga termasuk disini adalah belanja pegawai dan belanja bahan dari belanja pembangunan.

Untuk memperoleh nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing komponen dilakukan sebagai berikut:

i. Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja pegawai dari belanja rutin yang terdiri dari upah gaji, tunjangan beras maupun uang, pakaian dinas dan lain-lain belanja pegawai baik Daerah, Pusat maupun Hankam.
- Belanja pegawai yang berasal dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek-proyek APBN.

ii. Belanja Barang mencakup:

- Belanja barang dari belanja rutin (tidak termasuk belanja barang modal)
- Belanja barang dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek APBN.

iii. Biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin; seperti biaya perbaikan/pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan sebagainya.

iv. Belanja rutin lainnya; seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

v. Penyusutan barang modal.

Data realisasi pengeluaran keuangan Daerah Tingkat I, II dan Desa diperoleh dari laporan realisasi keuangan daerah masing-masing tingkat (K1, K2 dan K3).

Data mengenai realisasi anggaran rutin pemerintah pusat diperoleh dari setiap instansi tingkat Propinsi yang meliputi data belanja pegawai, belanja barang dan biaya pemeliharaan, sedang belanja pegawai dan belanja barang yang berasal dari belanja pembangunan berasal dari BAPPEDA Tingkat I yang meliputi data belanja pembangunan sektoral (dari APBN), Inpres SD, Inpres Desa (Bangdes), Inpres Kesehatan, Inpres Tingkat II, Inpres Pasar dan belanja pembangunan daerah yang bersumber dari Biro Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Data belanja pertahanan dan keamanan diperoleh dari masing-masing kesatuan militer di kabupaten dan propinsi (KOREM, DANSIONAL, DANLANUD, KOWIL, KEPOLISIAN), yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang.

Nilai pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan menjumlahkan nilai belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan dan belanja rutin lainnya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Hankam.

Sedangkan nilai atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan mendeflasikan nilai atas dasar harga yang berlaku semua jenis pengeluaran dengan Indeks Umum HPB tanpa ekspor.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Cara yang digunakan dalam menaksir nilai pembentukan modal tetap bruto Nusa Tenggara Timur adalah dengan pendekatan arus komoditi, yaitu menghitung nilai barang modal baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan modal tetap bruto hasil produksi lokal ditaksir dari nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri dan sektor konstruksi serta pembentukan modal tetap bruto yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur (melalui impor dan antar pulau masuk), ditaksir melalui arus barang-barang modal yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melalui impor dari luar negeri dan antar pulau masuk (hasil pengolahan BPP laut di pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur).

Sektor Industri

Barang-barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri antara lain dihasilkan oleh industri galangan perahu layar/perahu motor, meubel dan alat-alat pertanian. Nilai barang modal diperoleh dari perhitungan PDRB sektoral, baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan 2000.

Sektor Konstruksi

Nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor bangunan ditaksir dengan menggunakan rasio barang modal terhadap total nilai output sektor konstruksi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Sektor Pemerintahan

Nilai pembentukan modal tetap bruto oleh sektor pemerintahan antara lain terdiri dari biaya reboisasi dan penghijauan, pengadaan ternak bibit, sapi perah dan lain-lain yang diperoleh dari pengolahan realisasi belanja pembangunan (APBD dan APBN).

Sebenarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh pemerintah mencakup pula biaya konstruksi dan industri, akan tetapi mengingat komponen ini sudah dihitung pada sektornya maka tidak dihitung lagi di sini.

Nilai atas dasar harga konstan 2000 ditaksir dengan cara mendeflasikan nilai pembentukan barang modal atas dasar harga berlaku dengan menggunakan Indeks Umum HPB tanpa ekspor.

Impor dan Antar Pulau Masuk

Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari impor dan antar pulau masuk pada dasarnya merupakan barang modal, baik barang modal baru maupun barang modal bekas, yang dihasilkan oleh sektor industri di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Barang modal ini antara lain berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan berat dan sebagainya.

Nilai barang-barang modal atas dasar harga konstan 2000 dari luar wilayah tersebut ditaksir dengan cara revaluasi.

e. Ekspor dan Antar Pulau Neto

Untuk menaksir besarnya nilai ekspor neto Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan nilai impor dan nilai antar pulau masuk. Datanya diperoleh dari Kanwil Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik. Nilai atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

f. Perubahan Stok

Perubahan stok pada dasarnya adalah perubahan persediaan barang-barang yang berasal dari pembelian (baik untuk keperluan produksi suatu kegiatan ekonomi maupun untuk dijual lagi), dan barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual (baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi).

Pemegang stok terdiri dari produsen, pedagang dan pemerintah. Stok yang dikuasai oleh pemerintah mencakup barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan khusus (misalnya untuk mengatasi krisis dan sejenisnya).

Alat-alat berat seperti kapal dan lain-lain yang sedang dalam proses pengerjaan merupakan stok yang dikuasai oleh produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk stok akan tetapi menjadi bagian dari pembentukan modal tetap bruto.

Mengingat keterbatasan data maka nilai perubahan stok dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan diperlakukan sebagai sisaan (residual) dari PDRB sektoral setelah dikurangi komponen-komponen penggunaan lainnya.

II. TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

- ✓ *Komposisi Penggunaan PDRB*
- ✓ *Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB*

BAB II

TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

Sesuai dengan uraian terdahulu, PDRB dari sisi penggunaan akan mencakup seluruh produk akhir yang digunakan atau dikonsumsi oleh para konsumen akhir. Dengan kata lain PDRB dapat pula dipandang sebagai seluruh produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

Permintaan akhir, yaitu permintaan yang bukan untuk keperluan produksi, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan akhir domestik dan permintaan akhir dari luar wilayah. Permintaan akhir domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan akhir dari luar wilayah terdiri dari ekspor (dari luar negeri) dan antar pulau keluar (dari wilayah lain di dalam negeri). Pada prakteknya, penyediaan produk akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu wilayah seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan akhir yang ada. Dalam hal ini maka perlu didatangkan produk akhir dari luar wilayah, yang terdiri dari impor dan antar pulau masuk.

Uraian berikut akan mengamati komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dan perkembangannya.

2.1 Komposisi Penggunaan PDRB

Komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2005 sampai 2007 secara rata-rata dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal yang sama juga terjadi dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1a. dapat dilihat bahwa proporsi terbesar penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Secara rata-rata dalam 3 tahun ini, konsumsi rumah tangga mencapai 72.66 persen dari PDRB. Tahun 2005 proporsi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba sebesar 67.99 persen, dan tahun 2006 menjadi 74.27 persen. Pada tahun 2007 proporsinya kembali mengalami peningkatan menjadi 75.72 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.1a
Komposisi Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku

	(Persen)			
Rincian	2005	2006 ^{r)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	67.99	74.27	75.72	72.66
2. Konsumsi Pemerintah	17.89	19.75	20.23	19.29
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.02	14.59	14.39	13.33
4. Ekspor ^{b)}	17.90	24.01	21.53	21.15
5. Impor ^{c)} (-)	25.59	37.87	36.15	33.20
6. Perubahan Stok ^{r)}	10.79	5.25	4.27	6.77
PDRB	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:

a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba

b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar

c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk

r) Angka residual

**) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

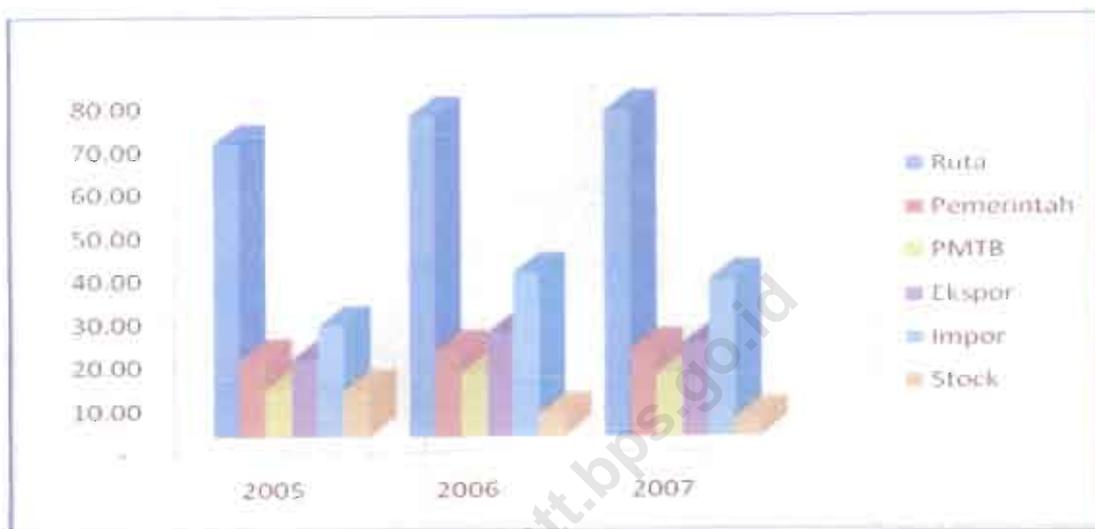
Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi permintaan ekspor dan antar pulau keluar proporsinya merupakan terbesar ketiga dan perkembangannya menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 2005 proporsi penggunaan untuk komponen ini sebesar 17.90 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, dan tahun 2006 proporsi ekspor dan antar pulau keluar naik sebesar 6.11 persen hingga mencapai 24.01 persen. Ini berbeda dengan keadaan tahun 2007, dimana proporsi ekspor mengalami penurunan terhadap PDRB NTT yaitu menjadi 21.53 persen.

Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dari sisi impor proposinya merupakan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba dan dalam perkembangan tiga tahun terakhir secara rata-rata kontribusinya sebesar 33.20 persen. Pada tahun 2005 proporsi impor dalam penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur sebesar 25.59 persen kemudian di tahun 2006 proporsi ini mengalami peningkatan menjadi 37.87 persen. Kondisi ini sangat berbeda pada

tahun 2007 dimana proporsi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam komponen impor menurun dibanding tahun 2006 menjadi 36.15 persen.

Tahun 2005 proporsi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur sebesar 11.02 persen dan tahun 2006 proporsinya mengalami peningkatan menjadi 14.59 persen. Akan tetapi tahun 2007 proporsi penggunaan dalam pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan menjadi 14.39 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.1. Komposisi PDRB NTT Menurut Penggunaan



Sementara itu konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah di Nusa Tenggara Timur proporsinya semakin meningkat selama periode 2005-2007. Pada tahun 2005 konsumsi pemerintah 17.89 persen dari PDRB Nusa Tenggara Timur. Proporsi tersebut pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 19.75 persen, kemudian pada tahun 2007 kembali mengalami hal yang sama yaitu peningkatan komponen penggunaan konsumsi pemerintah menjadi 20.23 persen terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur.

Perekonomian Nusa Tenggara Timur agaknya masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor dan antar pulau masuk dalam kurun 2005-2007. Pada tahun 2005 proporsi impor dan antar pulau masuk mencapai 25.59 persen dari total PDRB Nusa Tenggara Timur. Kemudian meningkat menjadi 37.87 persen pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan menjadi 36.15 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 36.15 persen produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan para konsumen akhir di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2005 terpaksa harus

didatangkan melalui impor dan antar pulau masuk. Tingginya proporsi impor dalam perekonomian ini cukup mengkhawatirkan karena merupakan cerminan dari tingginya pengaruh 'luar' dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Pola penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pola penggunaan PDB pada level nasional. Konsumsi rumahtangga dan ekspor memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hanya saja proporsi konsumsi pemerintah dan impor dalam perekonomian Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan proporsi kedua komponen tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Perkembangan komposisi penggunaan PDB Indonesia dari Konsumsi rumah tangga pada tahun 2005 sebesar 64.36 persen tetapi perkembangan dua tahun terakhir komposisi penggunaan rumahtangga terhadap PDB Indonesia berfluktuasi, yaitu pada tahun 2006 komposisi sebesar 62.66 persen terhadap PDB Indonesia. Sementara tahun 2007 kondisi komposisi rumahtangga dalam penggunaan PDB Indonesia kembali naik menjadi 63.46 persen terhadap PDB Indonesia. Berikut komposisi penggunaan konsumsi rumahtangga dan komponen lainnya dalam komposisi penggunaan PDB Indonesia dalam periode tersebut di atas selengkapnya.

Tabel 2.1b
Komposisi Penggunaan PDB Indonesia
Atas Dasar Harga Berlaku

Rincian	(Persen)			
	2005	2006 ^{a)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	64.36	62.66	63.46	63.49
2. Konsumsi Pemerintah	8.11	8.63	8.33	8.36
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.64	24.12	24.86	24.21
4. Ekspor	34.07	31.03	29.36	31.49
5. Impor (-)	29.92	25.62	25.33	26.96
6. Perubahan Stok ^{r)}	1.44	1.27	0.00	0.90
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:

a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba

r) Angka residual

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Konsumsi Pemerintah:

Komposisi penggunaan dari komponen konsumsi pemerintah secara nasional dalam tiga tahun terakhir 2005-2007 secara rata-rata 8,36 persen. Pada tahun 2005 komposisi konsumsi pemerintah sebesar 8,11 persen terhadap PDB Indonesia meningkat sebesar 8,63 persen pada tahun 2006. Tahun 2007 keadaan komposisi penggunaan konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia sedikit menurun menjadi 8,33 persen.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB):

Komposisi pembentukan modal tetap bruto dalam kurun waktu 2005-2007 secara rata-rata 24,21 persen terhadap PDB Indonesia, Pada tahun 2005 komposisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap PDB Indonesia sebesar 23,64 persen. Komposisi ini meningkat menjadi 24,12 persen pada tahun 2006. Kondisi ini tidak jauh berbeda ketika pada tahun 2007 dimana komposisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kembali mengalami peningkatan menjadi 24,86 persen.

Ekspor:

Komposisi Ekspor dalam penggunaan terhadap PDB Indonesia dalam tahun 2005-2007 dengan rata-rata komposisi penggunaan ekspor 31,49 persen. Pada tahun 2005 komposisi penggunaan ekspor terhadap PDB Indonesia sebesar 34,07 persen. Pada tahun 2006 komposisi penggunaan ekspor terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 31,03 persen, dan di tahun 2007 pun tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2006 dimana komposisinya menjadi 29,36 persen.

Impor:

Komposisi Impor dalam penggunaan PDB Indonesia dalam kurun waktu 2005-2007 secara rata-rata 26,96 persen. Pada tahun 2005 komposisi komponen Penggunaan terhadap PDB Indonesia sebesar 29,92 persen kemudian menurun menjadi 25,62 persen pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kondisi komposisi impor dalam penggunaan PDB Indonesia menurun kembali menjadi 25,33 persen.

Perubahan Stok:

Komposisi perubahan stok dalam penggunaan PDB Indonesia dalam kurun waktu 2005-2007 menunjukkan angka negatif, secara rata-rata komposisinya sebesar minus 4,22 persen.

2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB

2.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Laju pertumbuhan dalam penggunaan komponen konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu 2005-2007 secara rata-rata sebesar 7,50 persen. Namun dilihat berdasarkan kondisi pada tahun berjalan terjadinya fluktuasi, hal ini nampak pada tahun 2005 dimana laju pertumbuhannya sebesar 6,22 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhannya mengalami percepatan yang begitu besar hingga menjadi 9,46 persen. Namun kondisi di tahun tersebut tidak sama dengan tahun 2007 dimana laju pertumbuhan tahun 2007 hanya sebesar 6,82 persen.

2.2.2 Konsumsi Pemerintah

Laju pertumbuhan dalam penggunaan komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu 2005-2007 mengalami peningkatan dan secara rata-rata sebesar 6,22 persen. Pada tahun 2005 laju pertumbuhannya sebesar 5,03 persen. Peningkatan laju pertumbuhan terjadi pada tahun berikutnya, yakni sebesar 5,14 persen. Kondisi tahun 2007 terjadi peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan yakni menjadi 8,48 persen.

2.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2005-2007 masih belum menggembirakan, dengan rata-rata sebesar 4,86 persen. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan mencapai 3,42 persen, kemudian naik menjadi 5,04 persen pada tahun 2006 dan meningkat walaupun kecil pada tahun 2007 menjadi sebesar 6,11 persen.

Gambaran sepintas ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi yang dicerminkan oleh pembentukan modal tetap bruto (yang antara lain berupa pembelian baru untuk mesin atau barang modal lainnya) belum optimal dilakukan dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

2.2.4 Ekspor dan Antar Pulau Keluar

Ekspor dan antar pulau keluar Nusa Tenggara Timur selama periode 2005-2007 terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2005 ketika perekonomian Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan mengalami perbaikan, ekspor dan antar pulau keluar pun kondisinya ikut membawa dampak pada membaiknya perekonomian Nusa Tenggara Timur, yakni mengalami laju pertumbuhan sebesar 8,91 persen. Laju pertumbuhan

pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 10,77 persen. Tahun 2007 laju pertumbuhan tetap tinggi walaupun mengalami perlambatan menjadi 9,29 persen dibanding tahun 2006. Peningkatan volume dan banyaknya jenis komoditi yang diantarpulaukan mempengaruhi nilai antar pulau keluar pada tahun ini.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT
Atas Dasar Harga Konstan 2000

Rincian	(Persen)			
	2005	2006 ^{a)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	6.22	9.46	6.82	7.50
2. Konsumsi Pemerintah	5.03	5.14	8.48	6.22
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.42	5.04	6.11	4.86
4. Ekspor ^{b)}	8.91	10.77	9.29	9.66
5. Impor ^{c)} (-)	15.45	11.83	10.15	12.48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.46	5.08	5.15	4.56

Keterangan:

a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nir laba

b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar

c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk

**) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

2.2.5 Impor dan Antar Pulau Masuk

Pola pertumbuhan impor dan antar pulau masuk ternyata berbeda dengan pola pertumbuhan ekspor dan antar pulau keluar. Dalam kurun waktu 2005-2007 laju pertumbuhan impor dan antar pulau masuk mengalami penurunan, secara rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut sebesar 12,48 persen. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan impor dan antar pulau masuk mencapai 15,45 persen. Dan mengalami perlambatan pada tahun berikutnya yaitu menjadi 11,83 persen. Hal serupa terjadi pada tahun 2007 dimana pertumbuhan komponen ini hanya sebesar 10,15 persen.

III. PERKEMBANGAN PERANAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*
- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba*
 - ✓ *Pengeluaran Konsumsi Pemerintah*
 - ✓ *Pembentukan Modal Tetap Bruto*
 - ✓ *Ekspor dan Antar Pulau Neto*

<https://ntt.bps.go.id>

BAB III

PERKEMBANGAN PERANAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

Ulasan pada bab ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan setiap komponen penggunaan PDRB secara lebih rinci. Pembahasan akan mencakup dari sisi komposisi (proporsi) dan pertumbuhannya.

3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dimaksudkan di sini hanya konsumsi rumahtangga saja, tanpa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh lembaga swasta nirlaba.

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga di Nusa Tenggara Timur adalah untuk membayar pengeluaran kelompok makanan dalam kurun waktu 2005-2007 secara rata-rata 77,81 persen sedangkan non makanan hanya sekitar 22,19 persen. Jika dilihat dari tahun berjalan maka dalam kurun waktu tersebut ada kecenderungan penggeseran pola dari makanan ke non makanan. Pada tahun 2005 porsi konsumsi rumahtangga menurut pengeluaran makanan sebesar 77,96 persen dan tahun berikutnya mulai bergeser menjadi 78,44 persen pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 kembali menurun menjadi 77,03 persen.

Tabel 3.1
Proporsi Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	<i>(Persen)</i>			
	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	77,96	78,44	77,03	77,81
2. Kelompok Bukan Makanan	22,04	21,56	22,97	22,19
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
(Juta Rupiah)	9.561.634	11.912.583	13.788.129	

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2005 pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 22,04 persen menurun menjadi 21,56 persen pada tahun 2006, kemudian meningkat kembali menjadi 22,97 persen pada tahun 2007.

Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga

Laju pertumbuhan konsumsi rumahtangga baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan pada periode 2005-2007 terlihat berfluktuasi. Secara rata-rata laju pertumbuhan konsumsi makanan sekitar 7,67 persen sedangkan non makanan sebesar 7,97 persen. Secara mendalam dapat dilihat dari perkembangan konsumsi makanan dalam kurun waktu 2005-2007 terlihat dalam tabel. 3.2.

Pada tahun 2005 konsumsi kelompok makanan tumbuh 6,32 persen meningkat menjadi 9,46 persen pada tahun 2006. Keadaan ini kembali menurun pada tahun 2007 menjadi 7,23 persen.

Pada kelompok bukan makanan pada tahun 2005 tumbuh 6,13 persen meningkat menjadi 11,34 persen pada tahun 2006 ,Tetapi pada tahun 2007 kembali menurun menjadi hanya 6,44 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	6,32	9,46	7,23	7,67
2. Kelompok Bukan Makanan	6,13	11,34	6,44	7,97
JUMLAH	8,62	6,27	9,93	8,27

*Keterangan : *) Angka sementara*
****) Angka sangat sementara*

3.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

3.2.1 Pengeluaran

Berbeda dengan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dapat dirinci menurut kelompok makanan dan bukan makanan, data yang tersedia untuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya rincian menurut jenis lembaga, yaitu lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba di Nusa Tenggara Timur sepanjang kurun waktu 2005-2007 didominasi oleh lembaga keagamaan, yaitu secara rata-rata sebesar 96,10 persen. Dalam kurun waktu tersebut proporsi pengeluaran lembaga keagamaan secara berangsur-angsur menurun. Pada tahun 2005 porsi pengeluaran konsumsi lembaga keagamaan di Nusa Tenggara Timur sebesar 96,12 persen dan menurun kembali pada tahun 2006 menjadi 96,11 persen. Pada tahun 2007 porsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba di Nusa Tenggara Timur sebesar 96,08 persen.

Tabel 3.3
Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	(Persen)			
	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Kegamaan	96,12	96,11	96,08	96,10
2. Lembaga Sosial Lainnya	3,88	3,89	3,92	3,90
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
(Juta Rupiah)	507.960	641.442	702.546	

Keterangan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada pengeluaran lembaga sosial dan lainnya dalam kurun waktu 2005-2007 secara rata-rata 3,90 persen. Pada tahun 2005 proporsi pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada pengeluaran lembaga sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur sebesar 3,88

persen meningkat menjadi 3,89 pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 mengalami peningkatan kembali menjadi 3,92 persen.

3.2.2 Laju pertumbuhan:

Laju pertumbuhan konsumsi lembaga keagamaan memiliki pola perkembangan yang agak berbeda dengan pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya. Perkembangan laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta dan nirlaba di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2005-2007 dengan rata-rata 3,01 persen.

Pada tahun 2005 laju pertumbuhan konsumsi lembaga keagamaan mengalami pertumbuhan sebesar 5,36 persen (lihat Tabel 3.4). Pada tahun 2006 pertumbuhannya melambat menjadi 1,37 persen, dan pada tahun 2007 laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 2,41 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenis Lembaga
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Keagamaan	5,36	1,37	2,41	3,05
2. Lembaga Sosial Lainnya	1,73	1,67	2,99	2,13
JUMLAH	5,22	1,38	2,43	3,01

Keterangan :) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

Sementara perkembangan laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba untuk lembaga sosial lainnya pada kurun waktu 2005 -2007 secara rata-rata 2,31 persen. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba untuk lembaga sosial lainnya sebesar 1,73 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2006 dimana konsumsi lembaga swasta nirlaba untuk lembaga sosial lainnya tumbuh melambat sebesar 1,67 persen dan ditahun 2007 pertumbuhan menjadi 2,99 persen.

3.3 Konsumsi Pemerintah

3.3.1 Pengeluaran

Proporsi terbesar pengeluaran konsumsi pemerintah di Nusa Tenggara Timur pada periode 2005-2007 adalah untuk belanja pegawai bruto, yaitu belanja pegawai sebelum dipotong pajak dan berbagai potongan lainnya (lihat Tabel 3.5). Pada tahun 2005 proporsi belanja pegawai bruto terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 55,58 persen dan secara sangat lambat menurun hingga akhirnya menjadi 55,09 persen pada tahun 2007.

Tabel 3.5
Proporsi Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	55,58	55,42	55,09	55,36
2. Belanja Barang	9,74	9,85	9,65	9,75
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	6,61	6,56	6,50	6,55
4. Biaya Perjalanan Dinas	9,82	9,73	9,35	9,63
5. Belanja Rutin Lainnya	18,25	18,44	19,41	18,70
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
(Juta Rupiah)	2.649.443,3	3.338.112,5	3.872.101,2	

Keterangan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Proporsi terbesar kedua dari pengeluaran konsumsi pemerintah adalah untuk belanja rutin lainnya, yaitu secara rata-rata berkisar 18,70 persen. Pada tahun 2005 porsi Belanja Rutin sebesar 18,25 persen, meningkat menjadi 18,44 persen pada tahun 2006. Peningkatan proporsi juga berlanjut pada tahun 2007 yaitu menjadi sebesar 19,41 persen. Urutan berikutnya adalah untuk belanja barang, yang rata-rata proporsinya 9,75 persen dalam kurun waktu 2005-2007. Pada tahun 2005 proporsi pengeluaran pemerintah untuk belanja barang sebesar 9,74 persen meningkat menjadi 9,85 persen pada tahun 2006 dan kondisi ini pada tahun 2007 terjadi penurunan proporsi menjadi 9,65 persen. Selanjutnya biaya perjalan dinas

mendapat porsi dalam penggunaan konsumsi pemerintah rata-rata sebesar 9,63 persen. Perkembangan konsumsi pemerintah dari jenis pengeluaran belanja perjalanan dinas pada tahun 2005 sebesar 9,82 persen menurun menjadi 9,73 persen pada tahun 2006 kemudian pada tahun 2007 kembali menurun menjadi 9,35 persen. Untuk jenis pengeluaran biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada periode 2005-2007 berada pada kisaran 6,50 sampai dengan 6,61 persen. Perkembangan jenis pengeluaran biaya perbaikan dan pemeliharaan pada tahun 2005 Porsinya sebesar 6,61 persen menurun menjadi 6,56 persen pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 kembali turun menjadi 6,50 persen.

3.3.2 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah menurut jenis pengeluaran dalam kurun waktu 2005-2007 secara rata-rata 6,22 persen. Jika dilihat dari jenis pengeluaran maka terjadi peningkatan laju pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,03 persen meningkat menjadi 5,14 persen pada tahun 2006. Keadaan ini berlanjut pada tahun 2007 dimana laju pertumbuhan meningkat menjadi 8,84 persen. Jika dilihat secara mendalam maka pada tahun 2005 laju pertumbuhan jenis pengeluaran biaya belanja rutin lainnya yang menjadi laju pertumbuhan terbesar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,99 persen diikuti pengeluaran perjalan dinas sebesar 4,78 persen dan belanja pegawai bruto sebesar 4,73 persen sedangkan barang dan biaya perbaikan dan pemeliharaan masing-masing sebesar 3,25 persen dan 2,74 persen. Berbeda dengan keadaan pada tahun 2006 dimana Belanja barang menempati urutan pertama yaitu sebesar 6,39 persen diikuti belanja rutin lainnya sebesar 6,22 persen. Secara keseluruhan pada tahun 2006 mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali pada komponen pengeluaran belanja rutin lainnya yang mengalami perlambatan pertumbuhan. percepatan pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2007 untuk semua komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran belanja rutin lainnya yaitu sebesar 14,21 persen, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh komponen belanja pegawai bruto yaitu sebesar 7,84 persen, kemudian diikuti pengeluaran biaya perbaikan dan pengeluaran sebesar 7,48 persen dan belanja barang sebesar 6, 25 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah biaya perjalanan dinas sebesar 4,23 persen.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenisnya
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	4,73	4,83	7,84	5,80
2. Belanja Barang	3,25	6,39	6,25	5,30
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	2,74	4,33	7,48	4,85
4. Biaya Perjalanan Dinas	4,78	4,17	4,23	4,40
5. Belanja Rutin Lainnya	7,99	6,22	14,21	9,47
JUMLAH	5,03	5,14	8,48	6,22

Keterangan :) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

3.4.1 Pengeluaran

Pembentukan modal tetap bruto di Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2005-2007 ternyata didominasi oleh barang modal domestik (lihat Tabel 3.7). Secara rata-rata sebesar 78,43 persen. Pada tahun 2005 porsi pengeluaran untuk pembentukan barang modal tetap bruto domestik sebesar 81,30 persen kemudian menurun menjadi 78,19 persen pada tahun 2006. Keadaan ini berlanjut pada tahun 2007 dimana proporsi pembentukan barang modal tetap bruto untuk domestik mengalami penurunan menjadi 75,81 persen. Namun demikian, harus dilihat lebih cermat lagi bahwa sebagian besar pembentukan modal tetap bruto domestik pada kurun 2005-2007 tersebut ternyata berupa output dari sektor konstruksi, yang secara rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 97,54 persen. Pada tahun 2005 jenis pengeluaran sektor konstruksi sebesar 97,49 persen dan porsinya terus meningkat hingga sebesar 97,57 persen pada tahun 2007. Besarnya pembentukan barang modal dari konstruksi menunjukkan bahwa kandungan lokal dari pembentukan modal tetap bruto ini sebagian besar adalah berupa bangunan, yang perannya terhadap peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian kurang terlalu besar.

Sementara itu proporsi pembentukan modal untuk peningkatan kapasitas produksi agaknya belum terlalu besar. Hal ini ditunjukkan oleh masih relatif kecilnya proporsi pembentukan modal dari impor dan antar pulau masuk dan dari sektor industri domestik. Proporsi pembentukan modal yang terkecil dari kelompok sektor industri domestik dalam kurun 2005-2007 masih kurang dari 1 persen.

Tabel 3.7
Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	18,70	21,81	24,19	21,57
2. Domestik	81,30	78,19	75,81	78,43
a. Industri	0,94	0,91	0,90	0,92
b. Konstruksi	97,49	97,55	97,57	97,54
c. Pemerintah ^{G)}	1,57	1,54	1,53	1,55
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
(Juta Rupiah)	1.631.425	2.466.224	2.754.530	

Keterangan :) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

G) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

3.4.2 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto menurut asal barang cukup tinggi terjadi pada asal barang impor dan antar pulau masuk dimana pada tahun 2005 laju pertumbuhannya sebesar 7,17 persen dan pada tahun 2006 terjadi peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 22,47 persen, tetapi pada tahun 2007 kembali mengalami perlambatan menjadi 17,71 persen, walaupun laju pertumbuhan tetap saja tinggi. Untuk jenis pengeluaran pembentukan barang modal tetap bruto domestik pertumbuhan secara rata-rata dalam kurun waktu 2005-2007 sebesar 2,17 persen.

Pada tahun 2005 laju pertumbuhan asal barang domestik dalam pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,59 persen melambat menjadi 1,03 persen pada tahun 2006 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2,88 persen pada tahun 2007.

Jika melihat lebih dalam akan asal barang modal domestik dalam laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto maka asal barang dari konstruksi yang cukup baik dalam mendorong laju pertumbuhan PMTB dalam tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan PMTB menurut asal barang dan jenis pengeluaran konstruksi sebesar 2,61 persen melambat menjadi 1,10 persen pada tahun 2006. Akan tetapi pada tahun 2007 kondisi tersebut meningkat lagi menjadi 2,89 persen. Sedangkan industri dan pemerintahan laju pertumbuhan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan PMTB menurut asal barang dan jenis pengeluaran industri sebesar 2,09 persen menurun menjadi minus 2,10 persen pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kondisi ini meningkat lagi menjadi 2,28 persen. Laju pertumbuhan PMTB pemerintah pada tahun 2005 sebesar 1,96 persen. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi tahun 2006 yang menurun hingga sebesar minus 1,24 persen. Namun pada tahun 2007 kembali mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 2,24 persen.

Tabel 3.8
Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Asal Barang
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	7,17	22,47	17,71	15,78
2. Domestik	2,59	1,03	2,88	2,17
a. Industri	2,09	(2,10)	2,28	0,76
b. Konstruksi	2,61	1,10	2,89	2,20
c. Pemerintah ^{G)}	1,96	(1,24)	2,24	0,99
JUMLAH	3,42	5,04	6,11	4,86

Keterangan :) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

G) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto

3.5.1. Pengeluaran.

Nilai ekspor dan antar pulau keluar dari Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2005-2007 cenderung semakin meningkat (lihat Tabel 3.9). Pada tahun 2005 nilai ekspor dan antar pulau keluar mencapai 2.651.697 juta rupiah dan terus meningkat, pada tahun 2006 menjadi 4.059.393 juta rupiah dan hal yang sama terjadi ditahun 2007 kembali meningkat menjadi 4.119.844 juta rupiah. Walaupun nilai ekspor dan antar pulau keluar tersebut relatif tinggi, namun nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur ternyata jauh lebih tinggi lagi. Pada tahun 2005 nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur mencapai 3.789.699 juta rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 6.401.369 juta rupiah pada tahun 2006 dan kembali meningkat pada tahun 2007 menjadi 6.917.927 juta rupiah.

Kondisi tersebut mengakibatkan neraca perdagangan luar negeri dan antar pulau di Nusa Tenggara Timur terus menanggung defisit dalam kurun 2005-2007. Pada tahun 2005 defisit neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur sebesar minus 1.138.002 juta rupiah dan meningkat menjadi minus 2.341.976 juta rupiah pada tahun 2006. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2007 defisit tersebut meningkat kembali menjadi minus 2.798.083 juta rupiah.

Tabel 3.9
Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku Nusa Tenggara Timur

<i>(Juta Rupiah)</i>			
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{a)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	2.651.697	4.059.393	4.119.844
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	3.789.699	6.401.369	6.917.927
Ekspor Neto ^{a)}	-1.138.002	-2.341.976	-2.798.083

*Keterangan : *) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

a) Ekspor dikurangi impor

Jika diamati lebih jauh, ternyata peran perdagangan antar pulau lebih besar dibandingkan dengan peran perdagangan luar negerinya (lihat Tabel 3.10). Dalam kurun 2005-2007 peranan perdagangan antar pulau keluar berkisar antara 96,34 sampai 99,07 persen terhadap total ekspor dan antar pulau keluar. Begitu juga peranan perdagangan antar pulau masuk memiliki peranan yang cukup besar terhadap total impor dan antar pulau masuk. Pada tahun 2005 peran perdagangan antar pulau masuk mencapai 98,02 persen. Dan proporsi tersebut menurun hingga menjadi 96,96 persen pada tahun 2007.

Tabel 3.10
Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>			
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	100,00	100,00	100,00
- Ekspor	3,66	1,95	0,93
- Antar Pulau keluar	96,34	98,05	99,07
2. Impor dan Antar Pulau Masuk	100,00	100,00	100,00
- Impor	1,98	2,17	3,04
- Antar Pulau Masuk	98,02	97,83	96,96

*Keterangan : *) Angka sementara*

****) Angka sangat sementara*

3.5.2 Laju pertumbuhan

Jika diperhatikan laju pertumbuhannya, tampak bahwa antar pulau keluar dan antar pulau masuk memiliki perbedaan pola perkembangan (lihat Tabel 3.11). Pada periode tahun 2005-2007 sungguhpun masing-masing mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 2006 yang terjadi peningkatan pertumbuhan untuk antar pulau keluar hingga mencapai 12,13 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,27 persen, dan pada tahun 2007 kembali penurunan menjadi 10,53 persen. Sedang yang terjadi pada antar pulau masuk adalah penurunan pertumbuhan dari 15,00 persen menjadi 11,82 persen dan pada tahun 2007 menjadi 10,23 persen.

Namun demikian jika dilihat lebih rinci ke masing-masing komponen tampak bahwa masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda. Pada tahun 2005 nilai ekspor masih mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 110,84 persen, kemudian menurun hingga mencapai minus 32,04 persen pada tahun berikutnya, dan pada tahun 2007 ekspor mengalami penurunan yang sangat tajam hingga mencapai minus 55,48 persen.

Laju pertumbuhan impor luar negeri pada tahun 2005 mencapai 15,27 persen, sementara laju pertumbuhan antar pulau masuk adalah 15,00 persen. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan antar pulau masuk mencapai sebesar 11,82 persen sementara impor luar negeri menikmati laju pertumbuhan yang cukup tinggi hingga mencapai 42,63 persen. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan antar pulau masuk menjadi 10,23 persen sementara impor luar negeri pertumbuhannya menjadi 5,65 persen.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>			
Jenis Pengeluaran	2005	2006 ^{a)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	8,91	10,77	9,29
- Ekspor	110,84	-32,04	-55,48
- Antar Pulau keluar	7,27	12,13	10,53
2. Impor dan Antar Pulau Masuk	15,45	11,83	10,15
- Impor	15,27	42,63	5,65
- Antar Pulau Masuk	15,00	11,82	10,23
Ekspor Neto ^{a)}	-9,81	105,80	19,48

Keterangan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

TABEL-TABEL LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 1
Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2007

(Ribu Rupiah)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.561.634	11.912.583	13.788.129
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	507.960	641.441	702.546
3. Konsumsi Pemerintah	2.649.443	3.338.112	3.872.101
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.631.425	2.466.223	2.754.530
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	2.651.697	4.059.393	4.119.844
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	3.789.699	6.401.369	6.917.926
7. Perubahan Stok ¹⁾	1.598.010	887.688	817.758
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14.810.472	16.904.073	19.136.982
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.066.470	8.865.455	9.489.788
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	442.846	448.959	459.880
3. Konsumsi Pemerintah	1.891.612	1.988.779	2.157.511
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.287.729	1.352.624	1.435.294
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	2.916.845	3.231.053	3.531.151
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	5.387.868	6.024.985	6.636.674
7. Perubahan Stok ¹⁾	649.672	506.618	465.454
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.867.308	10.368.504	10.902.404

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	64.56	70.47	72.05
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	3.43	3.79	3.67
3. Konsumsi Pemerintah	17.89	19.75	20.23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.02	14.59	14.39
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	17.90	24.01	21.53
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	25.59	37.87	36.15
7. Perubahan Stok ¹⁾	10.79	5.25	4.27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	81,75	85,50	87,04
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	4,49	4,33	4,22
3. Konsumsi Pemerintah	19,17	19,18	19,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,05	13,05	13,16
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	29,56	31,16	32,39
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	54,60	58,11	60,87
7. Perubahan Stok ¹⁾	6,58	4,89	4,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	119,92	124,59	115,74
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	107,04	126,28	109,53
3. Konsumsi Pemerintah	109,91	125,99	116,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	97,03	151,17	111,69
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	107,74	153,09	101,49
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	101,79	168,91	108,07
7. Perubahan Stok ⁽¹⁾	92,58	55,55	92,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,89	114,14	113,21
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	106,27	109,91	107,04
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	105,22	101,38	102,43
3. Konsumsi Pemerintah	105,03	105,14	108,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	103,42	105,04	106,11
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	108,91	110,77	109,29
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	115,45	111,83	110,15
7. Perubahan Stok ⁽¹⁾	138,65	77,98	91,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	103,46	105,08	105,15

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 4
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	159,27	198,43	229,67
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	132,79	167,68	183,66
3. Konsumsi Pemerintah	297,36	374,66	434,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	161,54	244,20	272,75
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	191,57	293,27	297,64
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	149,43	252,42	272,78
7. Perubahan Stok ¹⁾	216,47	120,25	110,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	188,11	214,71	243,07
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Konsumsi Rumah Tangga	134,37	147,67	158,07
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	115,77	117,37	120,22
3. Konsumsi Pemerintah	212,31	223,21	242,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127,51	133,94	142,12
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	210,73	233,43	255,11
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	212,45	237,57	261,69
7. Perubahan Stok ¹⁾	88,01	68,63	63,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	125,33	131,69	138,48

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 5
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	118,54	134,37	145,29
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	114,70	142,87	152,77
3. Konsumsi Pemerintah	140,06	167,85	179,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	126,69	182,33	191,91
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	90,91	125,64	116,67
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	70,34	106,25	104,24
7. Perubahan Stok ^{r)}	245,97	175,22	175,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	150,10	163,03	175,53

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6
Konsumsi Rumah Tangga Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2007

(Juta Rupiah)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Kelompok Makanan	7.453.987	9.343.716	10.621.424
2. Kelompok Bukan Makanan	2.107.646	2.568.867	3.166.705
J U M L A H	9.561.634	11.912.583	13.788.129
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Kelompok Makanan	6.160.926	6,743,828.0	7,231,626.9
2. Kelompok Bukan Makanan	1.905.544	2,121,627.4	2,258,161.1
J U M L A H	8.066.470	8.865.455	9.489.788

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Tabel 7
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2007

<i>(Juta Rupiah)</i>			
Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Lembaga Keagamaan	488.237	616.464	675.040
2. Lembaga Sosial Lainnya	19.723	24.977	27.505
J U M L A H	507.960	641.441	702.546
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Lembaga Keagamaan	425.651.8	431.476.8	441.875
2. Lembaga Sosial Lainnya	17.194.8	17.482.2	18.004
J U M L A H	442.846.6	448.959.0	459.880

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Tabel 8
Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2007

(Juta Rupiah)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Belanja Pegawai Bruto	1.472.604	1.849.941	2.133.189
2. Belanja Barang	258.001	328.930	373.675
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	175.047	218.849	251.497
4. Biaya Perjalanan Dinas	260.230	324.869	362.060
5. Belanja Rutin Lainnya	483.559	615.522	751.678
J U M L A H	2.649.443	3.338.112	3.872.101
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Belanja Pegawai Bruto	1.051.388	1.102.157	1.188.600
2. Belanja Barang	184.204	195.970	208.209
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	124.978	130.386	140.132
4. Biaya Perjalanan Dinas	185.795	193.550	201.737
5. Belanja Rutin Lainnya	345.245	366.715	418.830
J U M L A H	1.891.612	1.988.779	2.157.511

Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 9
Pembentukan Modal Tetap Bruto Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2007

(Juta Rupiah)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	305.134	537.804	666.348
2. Domestik	1.326.290	1.928.419	2.088.182
a. Industri	12.451	17.543	18.887
b. Konstruksi	1.292.990	1.881.242	2.037.405
c. Pemerintah ¹⁾	20.849	29.633	31.889
J U M L A H	1.631.425	2.466.223	2.754.530
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	240.850	294.964	347.211
2. Domestik	1.046.878	1.057.660	1.088.082
a. Industri	9.827	9.621	9.841
b. Konstruksi	1.020.593	1.031.785	1.061.624
c. Pemerintah ¹⁾	16.456	16.252	16.616
J U M L A H	1.287.729	1.352.624	1.435.294

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

1) Tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal.konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

Tabel 10
Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2007

(Juta Rupiah)

Rincian	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	2.651.697	4.059.393	4.119.844
a. Ekspor	96.936	79.094	38.344
b. Antar Pulau Keluar	2.554.760	3.980.298	4.081.499
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	3.789.699	6.401.369	6.917.926
a. Impor	74.885	139.062	210.160
b. Antar Pulau Masuk	3.714.814	6.262.307	6.707.766
EKSPOR NETO¹⁾	1.138.002	2.341.976	2.798.083
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	2.916.845	3.231.053	3.531.151
a. Ekspor	89.610	60.901	27.113
b. Antar Pulau Keluar	2.827.235	3.170.152	3.504.037
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	5.387.868	6.024.985	6.636.674
a. Impor	75.786	108.095	114.206
b. Antar Pulau Masuk	5.291.385	5.916.890	6.522.468
EKSPOR NETO¹⁾	-2.471.022	-2.793.932	-3.105.523

Keterangan : 1) Ekspor Antar Pulau Keluar kurang Impor Antar Pulau Masuk
 *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Tabel 11
Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia
Tahun 2005-2007

(Milyar Rupiah)

Jenis Penggunaan	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	224.980,5	288.079,9	329.760,1
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	655.854,3	805.470,3	983.830,9
4. Perubahan Stok ¹⁾	39.974,6	42.382,2	169,7
5. Ekspor Barang dan Jasa	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	830.083,4	855.587,8	1.002.507,0
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1.043.805,1	1.076.928,1	1.131.186,7
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	134.625,6	147.563,7	153.309,6
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	393.500,5	403.161,9	440.078,2
4. Perubahan Stok ¹⁾	33.508,3	29.026,8	911,9
5. Ekspor Barang dan Jasa	793.613,0	868.256,5	937.849,2
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	639.701,9	694.605,3	756.348,3
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1.750.815,2	1.847.292,9	1.963.974,3

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 12
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut
Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Jenis Penggunaan	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	64.36	62.66	63.46
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.11	8.63	8.33
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.64	24.12	24.86
4. Perubahan Stok ^{r)}	1.44	1.27	0.00
5. Ekspor Barang dan Jasa	34.07	31.03	29.36
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29.92	25.62	25.33
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	59.62	58.30	57.60
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.69	7.99	7.81
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.48	21.82	22.41
4. Perubahan Stok ^{r)}	1.91	1.57	0.05
5. Ekspor Barang dan Jasa	45.33	47.00	47.75
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	36.54	37.60	38.51
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00

Keterangan : r) Residual

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 13
Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut
Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Jenis Penggunaan	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	208.4	244.2	293.1
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	247.8	317.3	363.3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	237.7	292.0	356.6
4. Ekspor Barang dan Jasa	166.0	182.0	204.0
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	196.1	202.1	236.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	199.6	240.3	284.8
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	121.8	125.7	132.0
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	148.3	162.6	168.9
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	142.6	146.1	159.5
4. Ekspor Barang dan Jasa	139.4	152.5	164.7
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	151.1	164.1	178.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	126.0	132.9	141.3

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 14
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut
Penggunaan
Tahun 2005-2007

(Persen)

Jenis Penggunaan	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	16.49	17.20	20.01
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.76	28.05	14.47
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.26	22.81	22.14
4. Ekspor Barang dan Jasa	27.78	9.65	12.12
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	31.26	3.07	17.17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.84	20.37	18.50
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.95	3.17	5.04
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.64	9.61	3.89
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.89	2.46	9.16
4. Ekspor Barang dan Jasa	16.60	9.41	8.02
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	17.77	8.58	8.89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.69	5.51	6.32

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

- Beckerman. W. (1968) *An introduction to national income analysis*. Weidenfeld and Nicholson
- BPS (2000) *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan*. Buku 3
- BPS (2006) *Laporan Perekonomian Indonesia 2007*
- BPS (2006) *Pendapatan Nasional Indonesia 2000 - 2007*
- BPS NTT (2006) *Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2005 -2007*
- Glasson. J. (1990) *Pengantar Perencanaan Regional.diterjemahkan oleh Paul Sitohang*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Marsisno.W. (2000) " *PDRB Menurut Penggunaan dan Manfaatnya dalam Perencanaan Pembangunan* ". naskah bahan diskusi intern. tidak dipublikasikan
- Partadiredja. A. (1993) *Perhitungan Pendapatan Nasional*. cetakan ke delapan. LP3ES
- Prayitno.H.Santosa.B. (1996) *Ekonomi Pembangunan*. Ghalia Indonesia
- Todaro. M. P. (1986) *Perencanaan Pembangunan : Model dan Metode*. dialihbahasakan oleh Siswo Suyanto. CV Inter Media

<https://ntt.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111
Telp. 0380-826289, 821755 Fax. 0380-833124
E-mail : bps5300@bps.go.id